

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN SESAN OLEH
PIHAK KELUARGA CALON MEMPELAI WANITA DALAM
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN**
(Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Gita Safitri Zanela

NPM: 1621040023

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN SESAN OLEH
PIHAK KELUARGA CALON MEMPELAI WANITA DALAM
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN**
(Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Gita Safitri Zanela

NPM: 1621040023

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M. Si

Pembimbimng II : Marwin, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Masyarakat adat Lampung Pepadun masih sangat kuat dalam memegang teguh prinsip kekerabatannya, tata cara perkawinan adat Lampung masih memiliki nilai yang penting untuk dipertahankan silsilahnya dan kedudukan sosial didalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki adat-istiadat masing-masing termasuk dalam hal perkawinan, selagi adat tersebut tidak menyalahi ajaran agama maka hal tersebut diperbolehkan. Masyarakat adat Lampung Pepadun mempertahankan garis keturunan bapak (*patrilineal*) sehingga anak lelaki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Sebagaimana diketahui pada masyarakat adat Lampung Pepadun dikenal dengan sebutan *sesan* dalam upacara adat perkawinan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tata cara penetapan *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan *sesan* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tata cara penentuan *sesan* yang ada dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun di kota Bandar Lampung yang masih memakai tradisi adanya *sesan* dalam adat perkawinan.

Metode menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan Analisa pada penelitian ini dengan dilakukan secara jenis kualitatif dengan Metode deduktif yang berarti suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata cara penentuan *sesan* adalah dengan pemberian uang jujur kepada mempelai wanita untuk dibelikan perabotan atau barang-barang rumah tangga yang akan dibawa ketika prosesi upacara perkawinan yang mana biaya pembelian barang tersebut dari uang yang diberikan oleh pihak pria di mana dalam penentuannya pihak keluarga wanita yang menentukan sesuai kemampuan pria dan mayoritas kebanyakan berdasarkan kelas sosial (Strata sosial) atau dengan istilah lain pemberian *sesan* diberikan oleh orang tua atau kerabat dari mempelai wanita, atau pemberiannya bisa ditangguhkan atau dijanjikan oleh kerabat dari mempelai wanita ketika berlangsungnya upacara perkawinan.

Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan *sesan* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun bahwa *sesan* termasuk kedalam *Urf* (adat kebiasaan) dan hukumnya mubah (memilih untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut atau tidak), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *sesan* ini sendiri merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan *syara'*, karena sifat dari *sesan* di sini tidak diwajibkan untuk dipenuhi

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Safitri Zanela

NPM : 1621040023

Jurusan/Prodi : Ahwal Syakshiyah (Ilmu Hukum)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Maret 2020

Penulis,

Materai
6000

Gita Safitri Zanela
NPM. 1621040023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. kol.Hi. Ednro. Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Nama : Gita Safitri Zanela
NPM : 1621040023
Jurusan/Prodi : Ahwal-Syakhshiyah (Ilmu Hukum)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H
NIP. 197501292000031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal-Syakhshiyah

H. Rohmat S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. Kol.Hi. Ednro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)** disusun oleh **Gita Safitri Zanela NPM. 1621040023** Jurusan **Ahwal Syakhshiyah (Konsentrasi Ilmu Hukum)** telah diujikan dalam sidang **munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Penguji III : Marwin, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَهَّزَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَسُوْهَا إِذْخِرُ (رواه النسائي)

Dari Ali, r.a katanya, “Rasulullah Saw. Mempersiapkan barang bawaan untuk
Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal.”
(HR Nasa’i)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupanku :

1. Kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai Ayahanda Zainifin dan Ibunda Lelawati. Cucuran keringat dan pengorbanan yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan dan bekerja keras demi keberhasilan anak-anaknya, serta telah mengantarkanku menuju gerbang keberhasilan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hari ini adalah buah dari perjuangan Ayahanda dan Ibunda tercinta, “Sungguh” Seandainya Tuhan tak cemburu akan kusembah engkau berdua. Abangku Gamal Qodri Zanela, semoga kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk beliau.
2. Keluarga Besar Kami Kakek (alm), Nenek (alm), Paman, Bibi, dan sepupuku Cindy Wulandari yang selalu menanti keberhasilanku.
3. Sahabat-sahabtku yang selalu memberikan dukungan, dan terima kasih kepada M. Yusril Hara Sidik atas dukungan serta kesabarannya dalam memberikan saya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Gita Safitri Zanela lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 1998, anak kedua dari dua bersaudara Gamal Qodri Zanela dari pasangan Bapak Zainifin dan Ibu Lelawati

Pendidikan dimulai dari TK (Taman Kanak-kanak) Pratama di Tanjung Karang Timur telah menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada tahun 2004, melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung lulus Tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan SMP di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tanjung Karang Bandar Lampung lulus tahun 2013. Selama sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) penulis aktif di berbagai kegiatan sekolah mulai dari Pramuka sebagai anggota Garda Jaya Bawika, Paskibraka pasukan 17. kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung lulus tahun 2016. Selesai lulus SMA penulis mengikuti ajang pemilihan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung dan Alhamdulillah mendapatkan Juara Muli Terfavorite. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu, pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Salam Ta’zim kepada para *Waliyullah*, Kiyai dan Alim Ulama.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (SI) pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M. H., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa.

3. Bapak H. Rohmat S.Ag.,M.H.I Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah), serta Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si dan Bapak Marwin S.H., M.H sebagai Dosen pembimbing, yang selalu membantu dan membimbingku dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama penulis menduduki bangku kuliah hingga selesai.
5. Bapak dan ibu para staff/karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Sahabat-sahabatku, Riki Rivanda Saputra, Kiki Nurul Husna, Lady Okta Triana, Elsi Fitriani, Tiara Putri Arpala, Regina Maretha, Irma Meinila, Riska Ayu Tri Kesuma, Elfa Yusmita Ardilla, Ririn Dwi Agustin, dan lain-lain yang tak biasa disebutkan satu-persatu yang selalu setia menemani dan membantuku dalam suka maupun duka, semoga kita menjadi orang yang sukses dan selalu dalam lindungan Allah Swt.
8. Sahabat-sahabat anggota kelas KIH dan angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teruskan perjuangan di bidang Hukum, Kalian Luar Biasa.
9. Teman-Teman Kelompok 24 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2019 Desa Margosari, Kabupaten Metro Kibang.

10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern ini.



Bandar Lampung, Penulis

Gita Safitri Zanela
NPM : 1621040023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Masalah.....	11
G. Signifikasi Penelitian	12
H. Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Masyarakat Adat lampung Pepadun	
1. Masyarakat Lampung Pepadun	21
2. Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun	23
3. Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung Pepadun	25

B. Perkawinan Adat Lampung	
1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung.....	28
2. Sistem Perkawinan Adat Lampung.....	30
3. Azas-Azas Perkawinan Adat Lampung	32
4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Lampung.....	34
5. Larangan Perkawinan Adat Lampung.....	38
C. Hukum Perkawinan Islam	
1. Pengertian Hukum perkawinan Islam	39
2. Dasar Perkawinan Islam.....	41
3. Tujuan Hukum Perkawinan Islam.....	44
4. Hikmah Perkawinan	44
5. Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan dalam Islam	46
D. Urf dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Urf atau Adat.....	48
2. Urf: Dasar Pengumpulan dalam Sejarah Islam.....	49
3. Penyerapan Adata dalam Hukum Islam.....	51
4. Kedudukan Urf dalam Sumber Hukum	54
5. Urf dalam KHI	55
E. Tinjauan Pustaka	57
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kelurahan Jagabaya 1	61
B. Nama-nama Pengurus Lid Adat dan Pengurus Bidang/Lid Adat Kelurahan Jagabaya 1	66
C. Tata Cara Pemberian Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun	68
BAB IV ANALISA DATA	
A. Tata Cara Pemberian Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Riset Kesbangpol Kota Bandar Lampung
2. Surat Permohonan Izin Riset Kesbangpol Lurah Jagabaya 1 Bandar Lampung
3. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Bandar Lampung kepada Kecamatan Wayhalim dan Lurah Jagabaya 1
4. Surat Jawaban Izin Penelitian dari Kelurahan Jagabaya 1
5. Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Surat Keterangan Wawancara
7. Blangko Bimbingan



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar terhindar dari kesalah pahaman penulisan judul skripsi, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan maksud istilah-istilah pada judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN SESAN OLEH PIHAK KELUARGA CALON MEMPELAI WANITA DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN** (Studi pada Masyarakat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah dari judul tersebut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis serta objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.¹
2. Hukum Islam ialah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Alquran maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relavan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.²
3. Sesan adalah barang bawaan yang di bawa saat berlangsungnya perkawinan dari mempelai wanita (yang berupa benda alat-alat rumah tangga, perhiasan dan sebagainya).³

¹Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), h. 1060.

²Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, (kairo: Maktabah Tijariah al- Kubro, 1423H), h. 100.

³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012), h. 235.

4. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di suatu tempat.⁴
5. Calon mempelai ialah orang yang sedang melangsungkan pernikahan.⁵
6. Wanita adalah wanita yang berjenis kelamin atau bergender perempuan.⁶
7. Masyarakat Adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁷
8. Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan Pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari paksi pak skala brak serta keturunannya.⁸
9. Kelurahan Jagabaya adalah kelurahan yang berada di kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. sebelum kecamatan Way Halim dibentuk, kelurahan ini berada di kecamatan Tanjung Karang Timur.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu pandangan hukum Islam tentang penentuan sesan oleh pihak calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1443

⁵Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 302.

⁶Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 474.

⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 102.

⁸Abdullah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: 2008), h. 230-231.

⁹Eka Jaya Saputra, wawancara dengan tokoh masyarakat kelurahan Jagabaya 1

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karena ingin mengetahui bagaimana *sesan* jika ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung, serta adanya alasan-alasan masih adanya tradisi *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung.
2. Daerah Lampung memang sudah tidak murni semuanya masyarakat asli adat Lampung, karena sudah terjadinya akulturasi baik dalam pendidikan, perdagangan, pernikahan dll. Apalagi di kota Bandar Lampung terutama di kelurahan Jagabaya 1 sudah banyak masyarakat pendatang yang berbaur, oleh karena itu dengan judul ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan *Sesan* oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung).
3. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bidang ilmu syari'ah yang penulis kaji di prodi *Al-Ahwalu-Shakshiyah* (Hukum Keluarga), serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian *study strata 1* (Satu) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi, perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.¹⁰

Istilah Hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “adat” saja dalam arti “kebiasaan” untuk dibedakan dengan istilah “hukum” dalam arti peraturan agama atau yang dikemukakan Abdul Karim Amrulloh ialah “ketetapan yang datang dari kalam Allah”. Jadi “adat” ialah ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan “hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari pada Allah.

Maksud dari Hukum Perkawinan Adat adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan ialah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.¹¹

¹⁰Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 49.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 14.

Suatu ikatan perkawinan bukan saja suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.¹² Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antar jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹³ Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الزاريات: 49)

Artinya : segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Az-zariyat: 49)¹⁴

Islam telah mengatur kehidupan setiap manusia yang di ciptakannya berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya telah di atur dalam hukum islam, dan ditetapkannya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik pribadi dan masyarakat, dunia akhirat. Kesejahteraan hidup dapat kita dapati dengan terbinanya kehidupan keluarga yang sejahtera, begitu pun sebaliknya, maka senada dengan masyarakat adat yang memandang perkawinan itu sebagai sebuah tujuan untuk membangun,

¹²Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*,, h. 50.

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 22.

¹⁴Al-Qur'an surat Az-Zariyat Ayat 49.

membina, dan memelihara hubungan kekerabatan atau keluarga. Perkawinan bisa merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.¹⁵ Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: 21)

Artinya: di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum : 21)¹⁶

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan di antara sesama mereka rasa kasih (*mawaddah*), yakni cinta dan rasa sayang (*rahmah*) rasa kasih. Sebab, bisa jadi seorang laki-laki mengikat wanita karena rasa cinta atau kasih terhadapnya sehingga mendapatkan keturunan darinya atau ia (wanita) butuh kepadanya dalam hal nafkah atau agar terjadi kedekatan hati diantara kedua nya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan yang tidak dapat melepaskan dari agama yang

¹⁵Syaeful Bakhri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008) h. 1

¹⁶Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21

dianut suami-istri dan menjadi salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹⁷

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agama membenarkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan. Berkaitan dengan poligami dan keadilan berpoligami, dalam konteks Indonesia, disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat member izin kepadaseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari

¹⁷Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 42-43

seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”¹⁸.

Dalam hubungan ini jelas bahwa kedudukan seorang suami dalam rumah tangga sebagai pemimpin bagi seluruh anggota keluarga dirumahnya. Masyarakat adat Lampung Pepadun yang mempertahankan garis keturunan dari seorang bapak atau yang sering kita sebut (*patrilineal*) sehingga seorang anak laki tua dari keturunan orang tua yang tua (penyimbang) memegang kekuasaan adat.¹⁹

Masyarakat adat Lampung dibedakan dari yang beradat, “peminggir”, yang berkediaman di sepanjang pantai “pesisir”, termasuk masyarakat adat Krui, Ranau, Komering sampai Kayuagung, dan yang beradat “Pepadun” yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung, terdiri dari Abung, Pubiyan, Waykanan-Sungkay dan Tulangbawang. Sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat 3 macam bentuk-bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan jujur, bentuk perkawinan semenda, dan bentuk perkawinan bebas. Tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun mengambil bentuk perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara *adat hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar manom, sebambangan*.²⁰

¹⁸Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, Jurnal al-Adalah, Vol XIII, Nomor 2, Desember 2016, h. 231

¹⁹Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibati* (Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau, 2013), h. 69

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 117

Bentuk perkawinan adat pada masyarakat yang beradat pepadun ialah berbentuk perkawinan jujur dengan garis keturunan dari bapak (*patrilineal*) dengan adanya pemberian uang kepada pihak kepada seorang mempelai wanita untuk mempersiapkan sesan, yang merupakan beberapa alat-alat kebutuhan rumah tangga. *Sesanini* yang nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga dari mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung diiringi penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga. Secara hukum adat, maka putuslah suatu hubungan antara mempelai wanita dengan orang tuanya.²¹

Upacara pengambilan mempelai wanita dilakukan siang hari, barang-barang bawaan mempelai wanita (*sesan*) dibawa bersama-sama ketempat mempelai pria. Tentang barang-barang yang dibawa si perempuan di waktu perkawinannya pada keturunan patrilineal (bapak) yang kuat si suami mendapat hak atasnya, tetapi ditempat lain tetap milik si istri sendiri dan juga adakalanya menjadi milik bersama, jadi barang bawaan (*sesan*) dalam artian ekonomis terkadang merupakan suatu pengganti dari pada jujur.²²

Harta pemberian atau hadiah adalah harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Mislanya ketika akan melangsungkan perkawinan anggota

kerabat memberi mempelai pria ternak untuk dipelihara guna bekal kehidupan rumah tangganya atau anggota kerabat wanita memberi mempelai

²¹Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h. 13

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 115

wanita barang-barang perabotan rumah tangga untuk dibawa kedalam perkawinan sebagai barang bawaan (*“sesan”*, Lampung).

Susunan masyarakat adat yang patrilineal yang menganut adat perkawinan jujur seperti dikalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, pada dasarnya baik istri maupun harta bawaannya (*sesan*) setelah masuk dalam ikatan perkawinan menjadi milik bersama yang di kuasai oleh suami dan di atur serta dimanfaatkan bersama dengan istri.²³ Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya meliputi penentuan sesan oleh pihak mempelai wanita
2. Tata cara sesan dalam masyarakat adat Lampung pepadun, budaya/adat perkawinan yang ada di masyarakat adat Lampung dan hukum islam

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara penentuan *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?

²³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 159-160.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan *sesan* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?

F. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui tata cara penentuan *sesan* yang ada dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun di kota Bandar Lampung yang masih memakai tradisi adanya *sesan* dalam adat perkawinan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap penentuan *sesan* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung pepadun khususnya di Bandar Lampung.

G. Signifikasi penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut dan juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademik yang bergelut dalam kajian hukum khususnya dalam bidang materil peradilan agama.

2. Aspek Praktis

Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di UIN Raden Intan Bandar Lampung dan Fakultas Syari'ah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan, metodologi adalah suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam penelitian dan didalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,²⁴ dan oleh karena itu metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini (*research*) dengan penggunaan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga penulis dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data, informasi yang melalui wawancara dan pendataan yang

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), h.7

berkaitan dengan lapangan. Terkait akan hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap Tinjauan hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

b. Sifat Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian ini, di mana harus memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Penulis menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang diteliti²⁵ dan telah diberlakukan ini disebut dengan data primer. penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk mencari semua data-data yang berdasarkan data yang berada di lapangan dan juga yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

²⁵*Ibid*, h.52

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer.²⁶ Setelah itu kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan salah satu sumber yang kegunaanya untuk memberikan sebuah petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.²⁷ data-data ini bersumber pada dari kamus, transkrip, internet, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data, dengan mengambil langkah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan cara pencatatan secara cermat dan dengan sistematis terhadap suatu penelitian.²⁸ Mengenai penelitian ini, penulis mengamati objek yang berada di lapangan dengan jenis observasi non-partisipan yaitu

²⁶*Ibid.* h. 53

²⁷*Ibid.*h. 23

²⁸Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

dengan cara mengamati secara fisik langsung berada di lapangan akan tetapi tidak ikut berperan di dalam bagian acara .

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian proses interaksi antara pewawancara dengan orang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.²⁹ Wawancara agar kita dapat menggali informasi-informasi secara langsung kepada orang-orang yang berkaitan salah satunya tokoh masyarakat Lampung Pepadun yang ada di kelurahan jagabaya I yang total keseluruhan populasi yaitu: ketua adat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat Jagabaya berjumlah 8 orang, dengan teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas.

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan semua kenyataan yang transparan yang didapati dari sampel.³⁰ Subyek penelitian ini terdiri dari para anggota masyarakat adat Lampung pepadun yang dibatasi oleh sampel dari masyarakat tersebut (populasi) sebagai wakil yang diteliti. Mengingat banyak anggota masyarakat tersebut, sehingga yang menjadi populasi ialah jumlah keseluruhan data kartu keluarga (KK) di kelurahan

²⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.373.

³⁰Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Angkasa, 1995, h. 54

Jagabaya 1, Masyarakat adat Jagabaya 1 berjumlah kurang lebih 250 KK. Rata-rata masyarakat Jagabaya 1 tersebut masih menggunakan sesan dalam setiap pernikahan atau perkawinan.

2. Sampel

Sampel adalah metode atau teknik yang dapat mewakili populasi, yaitu dengan menentukan anggota sampel dengan jenis *purposive sampling* yaitu penelitian yang dilakukan dengan beberapa daerah terkunci.³¹ Untuk mengetahui *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, dalam skripsi ini penulis memilih sampel untuk diteliti dari jumlah anggota masyarakat di daerah tersebut dikarenakan waktu yang terbatas. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memilih sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 ketua adat, 2 tokoh adat, 2 tokoh masyarakat dan 3 masyarakat yang telah melakukan prosesi sesan yang ada di Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial dimana mencari data berupa, buku, catatan, sejarah kehidupan, foto, dan yang lainnya.³² Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data.

³¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 1986), h. 148

³²*Ibid*, h. 391.

4. Teknik Pengolahan Data

Didalam metode pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu teknik dimana penulis mengoreksi atau meneliti kembali terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan atau data yang sudah di peroleh, kevalitan data yang telah diperoleh berdasarkan pada fenomena lapangan maupun studi literatur yang berkaitan terhadap.
- b. Sistemasi data maksudnya cara penulis menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data merupakan proses, pengkategorikan data, menyusun, mencari tema atau pola dengan maksud agar memahami maknanya.³³ penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan sebuah (*research*).

Setelah itu hasil dari penyajian penelitian yang didapati dari pengolahan data tersebut disatukan dengan analisa data.³⁴ Setelah seluruh data dari penelitian tersebut sudah berhasil terkumpul, langkah selanjutnya melakukan pengolahan data dengan melalui proses editing, dimana seorang peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi,

³³S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004),h. 72.

³⁴Soerjono Soekanto, *Ibid.*, h. 68.

relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Apabila seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan memenuhi kualifikasi, maka data dapat disiapkan untuk keperluan pada proses berikutnya.

Setelah data sudah terkumpul, selanjutnya melakukan analisa menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yang berarti “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus.”³⁵ Dalam membuat suatu kesimpulan terkait batasan sikap berdasarkan pada suatu akidah maka di gunakanlah Metode deduktif pada acara pernikahan adat Lampung atau yang disebut sesan sehingga di sini bisa dilakukan analisis bagaimana Islam memandang ketentuan tersebut.

³⁵Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 07 Desember 2018 pukul 19.00 WIB.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

1. Masyarakat Lampung Pepadun

Salah satu masyarakat Lampung yang dikenal dengan sebutan masyarakat Lampung pepadun terbagi menjadi beberapa perserikatan adat yang disebut, *Pubiyan Telu Suku* (Pubiyan Tiga Suku), *Megou Pak TulangBawang* (Marga Empat Tulang bawang), *Abung Siwou Migou* (Abung Sembilan Marga), *Sungkai* (Sungkai Bunga Mayang), *Buway Lima Waykanan* (Lima Keturunan Waykanan)³⁶.

Masyarakat yang berketurunan Abung (pepadun) tadinya berasal dari wilayah Danau Ranau berada di Sekala Berak. Lalu berpindah dengan menyusuri lembah dan sungai, dan pada akhirnya berkembang dan membentuk lima jurai keratuan dan Setiap ratu mempunyai kekuasaan daerah masing-masing serta anak buah yang merupakan kelompok besar seketurunan.³⁷

Salah satu Masyarakat Lampung yang beradat Abung Sewo Mego (abung sembilan marga) yang berasal dari Ratu di Puncak. Awal mulanya Ratu di puncak membuat pemukiman di daerah Skala Berak (Padang yang Luas) diperkirakan sekitaran daerah Liwa Lampung Barat pada saat ini. Bermula di Sekala Berak keturunan-keturunan Ratu dipuncak menyebar

³⁶Yula Fadilah, "Pemberian Gelar Adat" (Studi tentang Prosedur, Makna, Fungsi Pemberian Gelar Adat, pada Masyarakat Lampung Pepadun Sungkai Di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Universitas Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung, 2018), h. 8.

³⁷*Ibid*, h. 9.

luas ke beberapa daerah, diantaranya ke bagian Utara dan Selatan, seperti didaerah Komering dan Kayu Agung Sumatera Selatan dan yang lainnya untuk penyebaran pertama kali wilayah Way Abung Lampung Utara. Lalu warga Way abung menyemkati mereka ber-adat *Abung Sewo Mego*.

Ada pula Megou pak tulangbawang disekitaran Menggala dan masyarakat pubian lazim dengan nama *Pubiyan Telu Suku* yaitu Masyarakat Tamba pupus dan masyarakat *Bukujadi*, wilayah kotabumi terbagi dua, kota bumi bagian utara terdiri dari *Buway Lima Waykanan* dan kotabumi bagian selatan terdiri dari, *Buay Pemuka Baradatu*, *Barasakti* dan *Buay Semangka*, serta masyarakat sungkai.

Asal mula masyarakat yang beradat pepadun, dimulai dari empat keratuan yaitu Ratu di Balau berada di daerah jabung Lampung Selatan, keturunan Ratu di Pugung yang menurut kisahnya berada di daerah jabung Lampung Tengah.³⁸ Terbagi menjadi 5 persekutuan adat pepadun:

- a. Pubiyan Telu Suku (Pebiyan Tiga Suku)
- b. Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga)

Yang termasuk dalam persekutuan Abung Siwo Migo adalah keturunan sebagai berikut: *Buay Selagi*, *Buay Subing*, *Buay Kunang*, *Buay Nuban*, *Buay Baliyuk*, *Buay Unyai*, *Buay Unyi*, *Buay Nyerupa*, dan *Buay Anak Tuho*.

³⁸*Ibid*, h. 10.

- c. Tulang Bawang Migo Pak (Tulang Bawang Marga Empat)
Persekutuan adat terdiri dari *Suway Umpu*, *Buay Temago'an*, *Buay Aji*,
dan Way Kanan Buay Lima (Lima Keturunan) dan Sungkai
- d. Persekutuan adat Pubiyan Telu suku antara lain Suku Buku jadi, Suku
Tambo Pupus dan Suku *Menyerakat*.
- e. Sungkai bunga mayang

Persekutuan Nilai-nilai adat budaya Lampung Pepadun dapat dilihat dari ketatanegaraan "*kepunyimbangan*" kekerabatan dan perkawinan, musyawarah dan mufakat serta peradilan adatnya, yang semuanya didasarkan pada pandangan hidup pi'il pesenggiri.³⁹

2. Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung

Sesan pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun yang pada umumnya dibawakan di hari resepsi pernikahan atau perkawinan kedua mempelai. Sesan yang di berikan nantinya sangat berguna dan bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga. Sesan yang artinya dalam bahasa lampung merupakan seserahan berupabenda atau barang berupa alat kebutuhan rumah tangga, yang nantinya akan diberikan keluarga mempelai wanita ketika hari pernikahan.

Ketika mereka menjalankan rumah tangga, mereka sudah memiliki peralatan dan perabotan rumah tangganya sendiri. Tujuannya untuk meringankan pasangan suami istri yang akan menjalankan rumah tangganya, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa Wanita

³⁹*Ibid*, h. 11.

Lampung khususnya Lampung Pepadun itu mahal, tetapi sebenarnya apa yang diberikan uang dari pihak laki-laki itu akan diberikan kembali lagi oleh pihak wanita tetapi bukan berupa uang melainkan berupa sesan dan nilai sesan yang diberikan itu bisa saja berupa peralatan dan perabotan rumah tangga.⁴⁰

Di dalam masyarakat pepadun ada upacara adat yang dikenal dengan istilah sesan. Sesan mengandung dua arti, pertama: barang yang dibawa pada saat berlangsungnya pernikahan, yang nilainya sesuai dengan uang di berikan lelaki. Kedua: barang bawaan dari pihak mempelai wanita, merupakan harta warisan dari orang tuanya. dapat disimpulkan, kecil besarnya uang yang diberikan kepada mempelai laki-laki tidak begitu mempengaruhi besar atau kecilnya sesan yang dibawa mempelai wanita.⁴¹

Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak wanita yang akan memasuki jenjang pernikahan dimana semua anggota, kerabat mempelai wanita berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan (sesan) yang akan dibawa ketempat suami. Pemberian bekal ini ada kemungkinan bahwa barang-barang tersebut belum disampaikan ketika perkawinan berlangsung, tetapi akan ditangguhkan penyampaianya dan masih tinggal dirumah orang tua pihak wanita atau berupa janji yang kemudian baru akan dipenuhi dan disampaikan oleh kedua mempelai sebagai suami istri.

⁴⁰Afrizal Jumli, "Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan", (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), h. 3

⁴¹Ibid, h. 4

Sesan yang diberikan kerabat untuk mempelai wanita dapat berupa harta tetap, rumah atau tanah pekarangan atau hanya berupa perabotan rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.⁴²

3. Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung

Kerabat ialah suatusatu-kesatuan dari beberapa keluarga menurut sendi kekeluargaannya masing-masing. Rukun kerabat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu rukun kerabat yang di lihat dengan banyak atau sedikitnya anggota keluarganya, jadi terdiri dari rukun kerabat besar dan rukun kerabat kecil.

Menyanak Warei sebutan untuk kehidupan kekerabatan dalam adat Lampung Pepadun, *menyanak warei*, yang artinya dari keluarga ibu ataupun bapak, dari hubungan darah atau pun hubungan perkawinan atau yang beradat *mewarei*. Dalam kelompok kekerabatan setiap orang wajib untuk mengerti anggota kerabatnya baik pihak ayah sampai pihak ibu, selain itu kita juga wajib tahu kedudukan serta tanggung jawabnya.

Warga yang ber-adat Lampung pepadun berprinsip anak laki laki dari keturunan tertua (*penyimbang*) memegang kekuasaan adat. Dan dia pula yang akan mewarisi kepemimpinan ayahnya sebagai kepala kerabat seketurunan atau kepala keluarga.⁴³

⁴²Meli Pitria, “Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (studi kasus di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016) h. 36-37

⁴³Sabaruddin SA, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, *Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, (Jakarta: Buketin Way Lima Manjau), h. 59

Sakai Sambyan merupakan salah satu kekerabatan yang sangat positif dimana ia menghadapi permasalahan baik maupun susah dan senang. Diantaranya, membantu anak kemenakan melanjutkan pendidikannya, meninggal dunia dan mengurus, membantu dan mengurus upacara adat, memelihara janda dan anak-anak yatim, melahirkan, ada keluarga yang sedang sakit, khitanan atau perkawinan. Hal ini tercermin dalam sistem upacara-upacara adat dan bentuk perkawinan adat yang berlaku. penyimbang sangat dihormati dan begitu istimewa, karena merupakan pusat dari pemerintahan kekerabatan, baik dari hubungan darah maupun karena perkawinan.

a. Kelompok kekerabatan pertalian darah

Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara *penyimbang* dengan para anggota kelompok keluarga *warei*, kelompok keluarga *Apak Keamanan*, kelompok *warei* dan kelompok Anak.

b. Kelompok kekerabatan dengan tali Perkawinan

Kelompok ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok, yaitu kelompok *kelama*, kelompok *lebu*, kelompok *benulung* dan termasuk pula kelompok *kenubi*, serta ada pula kelompok pesabaian kelompok *Mirul-mengiyan* dan *Merau* serta *Lakau*.

c. Kelompok kekerabatan yang bertalian adat Mewarei

Adanya hubungan kerabat di karenakan tidak mendapatkan tidak mempunyai *Wari* atau Saudara atau keturunan/anak laki-laki.⁴⁴

B. Perkawinan Adat Lampung

1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung

Salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting yaitu Perkawinan. Perkawinan bukan hanya perempuan dan laki-laki saja namun terdiri dari saudara, orang tua, serta keluarganya. Arti perkawinan dalam masyarakat Indonesia yaitu perkawinan keluarga laki dan keluarga perempuan. Aturan-aturan yang dijalankan begitu banyak, dan aturan yang berhubungan dengan adat baik religio-magis.⁴⁵

Masyarakat adat Lampung perkawinannya berbeda-beda jika perkawinan adat Lampung *Saibatin* (*Lampung pesisir*), Lampung *Pepadun* dan serta bahasa, seni budayanya. bahasa Lampung yang berdialek “*nyow*” ataupun “*Api*”, sebenarnya bahasa melayu lama yang telah berubah dalam langgam ucapannya. Antara yang berdialek “*Nyow*” dan berdialek “*Api*” dan mereka dapat berbicara satu sama yang lain dan saling mengerti. Seperti yang kita ketahui golongan *Saibatin* (*Lampung Pesisir*) adalah masyarakat adat Krui, Ranau, Komering yang berkediaman di sepanjang pesisir pantai, sedangkan

⁴⁴Cristian Heru Cahyo Saputro, *Piil Pesenggiri Etos dan Semangat KeLampungan*, (Bandar Lampung: Jung Foundation Lampung Heritage, 2011), h. 40

⁴⁵Trianto Dan Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h.10.

Pepadun bertempat tinggal didaerah Lampung pedalaman seperti Tulang Bawang, Way Kanan, Sungkai, Abung, Pubian.⁴⁶

Perkawinan dalam masyarakat lampung ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari saudara sekandung perempuan. Dan perkawinan darri sekandung laki dan perempuan pun bisa di kawinkan. Tidak layak pula melangsungkan perkawinan setiap anak dengan dua keluarga yang sama.

Masyarakat Lampung melangsungkan perkawinan *leviraat* dan *sororaat*. Perkawinan *leviraat* yakni Lampung: *nyemalang nyikok* perkawinan seorang perempuan yang sudah pernah menikah atau sering kita sebut (janda) dengan laki-laki yang merupakan adik atau kakak dari suami *almarhum*. Masyarakat Lampung tidak menikahi yang berstatus anak-anak atau di bawah umur (*sanak*). Hingga saat ini, masih diberlakukan ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan diantara anggota masyarakat yang tidak sesuku (*bilik*), masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan antara mereka yang serupun (sama-sama anggota masyarakat Lampung). ketentuan saat ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, dengan melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.⁴⁷

Masyarakat beradat Lampung pepadun ditentukan, yang tidak boleh melangsungkan perkawinan yaitu, antara dua orang yang masih

⁴⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 117.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 219-220

berhubungan darah garis keturunan menyamping, antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, antara saudara nenek, antara dua orang yang masih berhubungan semenda yaitu mertua , anak tiri, menantu dan ibu dan bapak tiri, dan antara dua orang yang masih berhubungan sesusuan.

2. Sistem Perkawinan Adat Lampung

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (*ethnologi*) sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem “*endogami*” dan sistem “*exogami*” yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah, dan atau dengan sistem “*eleutherogami*” sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.

Terdapat pula perkawinan *exogami* jadi si laki-laki mencari wanita yang akan di jadikan istri dari lain marga(*Klen-patrililinal*) dan ada pelarangan kawin dengan semarga. Masih ada pula daerah yang menggunakan sistem *endogami* dimana pria diwajibkan mendapat wanita didalam lingkungan kerabat ntah dari 1 suku, klen atau bahkan dari famili sendiri. Sitem *endogami* ada pelarangan untuk mencari calon wanita dari luar wilayah kerabat, hal ini masih berlaku di wilayah Toraja Sulawesi Tengah atau kalangan masyarakat kasta di Bali.

Zaman modern ini sistem perkawinan *exogami* atau *endogami*, masih ada saja yang masih menggunakan terutama golongan tua, hal ini dikarenakan mereka dapat menjaga harta mereka agar tidak keluar dari luang lingkup mereka.

Berbeda dengan sistem *eleutherogami* seorang pria tidak lagi di larang diberi batasan atau diwajibkan mencari seorang wanita di lingkungan keluarga.⁴⁸

Adat Lampung berbeda dengan dengan adat lainnya yang ada di nusantara. Adat lampung di bagi menjadi 2 sistem perkawinan, *Pertama*, melalui lamaran dengan upacara adat yang besar (*gawei balak*) atau dengan sederhana (*gawei lunik*). *Kedua*, melalui perkawinan tanpa proses lamaran yaitu dengan kawin lari yang masih dilakukan hingga saat ini.⁴⁹

3. Azas-azas Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, yang diharapkan dari perkawinan ialah keturunan yang nantinya akan menjadi penerus dari orang tua. Bila tidak ada keturunan maka keluarga tersebut di anggap "putus keturunan" (*"punu"*, Batak Karo: *"mupus"*, Lampung :

⁴⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,h, 67-69

⁴⁹Prima Angkupi, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevasinya Terhadap Hak Asasi Manusia", ASY, SYIR'AH, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No.2, (Desember 2015), h. 45.

“*putung*”, Bali). Jika seorang istri tidak bisa memberi keturunan maka, pihak dari keluarga laki-laki akan mendesak untuk menikah lagi, demi memperoleh keturunan.⁵⁰ Azas-azas perkawinan hukum adat Lampung:

- a. Tujuan dari perkawinan membentuk suatu keluarga yang rukun dalam rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah.
- b. Adat lampung ini pula tidak akan dianggap dan tidak syah jika pernikahan hanya dengan hukum agama, karena tidak melibatkan penimbang serta anggota kerabat lain.
- c. Perkawinan wanita dan pria, hukum adat yang menentukan kedudukannya.
- d. Perkawinan berlangsung diharuskan atas persetujuan orang tua sertamasyarakat adat/anggota kerabat.⁵¹
- e. Perkawinan disini tidak memandang umur, bila umur antara laki laki dan perempuan mereka tetap boleh dikawinkan ini yang sering disebut kawin gantung.
- f. Dalam Perkawinan yang sudah cukup umur maupun belum cukup umur harus dapat izin dari orang tua.
- g. Dalam pernikahan memungkinkan terjadinya perceraian, perceraian yang nantinya akan berdampak renggang diantara dua keluarga maka dari itu perceraian ada yang bolehkan dan ada juga yang tidak di perbolehkan.

⁵⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,h. 70

⁵¹*Ibid*, h. 72

- h. Tentang keseimbangan kedudukan antara suami dan istri sudah ditetapkan oleh ketentuan adat yang sudah dibakukan.⁵²

Perkawinan sangatlah penting dalam hukum adat, oleh karena itu bagi masyarakat Lampung, perkawinan sangat perlu adanya pengesahan yang berbentuk upacara menurut adat yang resmi, semua dipengaruhi oleh kemampuan dan musyawarah dari kedua pihak keluarga dan dilihat pula dari kedudukan seseorang tersebut bila upacara mau besar atau kecilnya.⁵³

4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Lampung

a. Perkawinan Jujur

Suatu bentuk perkawinan yang dibayarkan dengan uang ataupun berbentuk barang yang diberikan dari pihak calon suami kepada calon mempelai wanita. Setelah menerima berupa barang atau duit jujur oleh pihak calon istri, berarti setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka istri akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat asalnya, kemudian masuk pada lingkungan kerabat suaminya untuk selama ia mengikat dirinya dalam perkawinan itu, begitu juga anak-anak yang dilahirkan akan masuk ke dalam lingkungan kerabat bapaknya. Perkawinan yang berbentuk seperti ini menarik garis dari keturunan bapak (*patrilineal*).

⁵²*Ibid*, h. 72

⁵³Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*,, h. 69.

Jujur merupakan suatu transaksi tunai didalam sistem perkawinan masyarakat patrilineal. Di daerah Lampung pepadun disebut “*seroh*”Lampung pesisir “*Jojokh*”. Di daerah Maluku disebut “*Wilin*”, di daerah Bali disebut “Patukunluh” dan di daerah Timor disebut “*Belis*”.⁵⁴

b. Perkawinan Semanda

Jika terdapat perkawinan dengan tidak menyertai pembayaran jujur dari seorang calon mempelai laki-laki kepada calon istri. Sesudah perkawinan terlaksanakan maka seorang suami menetap di pihak istri lalu melepaskan kedudukan serta haknya dari kerabatnya sendiri.

Sering kita temui perkawinan semanda ini yang menarik dari keturunan ibu (*matrilineal*). Ada beberapa macam perkawinan semanda diantaranya; Semanda *ngangkit*, Semanda lepas, Semanda nunggu, Semanda raja-raja, dan Semanda anak dagang.⁵⁵

c. Perkawinan Pineng Ngerabung Sanggar

Prinsip dari perkawinan harus diadakannya upacara “*gawi*” ditempat calon mempelai wanita, dan “*bergawi*” ditempat calon mempelai laki-laki, dari kedua belah pihak harus menyebelih hewan berupa sapi atau kerbau. Sesudah disepakatinya musyawarah antara pihak gadis dan bujang. Setelah itu,

⁵⁴Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 52

⁵⁵Ibid, h. 53

penyimbang atau istilah lainnya penyimbang dari gadis menyampaikan suatu tujuan atau maksud ada dilaksanakannya acara *pineng ngerabung* sanggar, tertuju pada ketua penyimbang adat kampung. Selanjutnya, dibentuklah panitia atau dalam bahasa adatnya dikenal *memattuan*, yaitu pembentukan pengatur *gawi* (panitia *gawi*) dan personalia pelaksanaan dan bahasan silsilah tentang keluarga yang akan mengadakan *gawi*.⁵⁶

d. Perkawinan Lari

Perkawinan lari digunakan di wilayah kalangan masyarakat masyarakat, Bali, Maluku, Lampung, Batak, Lampung, Bali, Makasar/Bugis

Di wilayah ini kawin lari itu termasuk kedalam pelanggaran adat, hal ini dapat diselesaikan dengan tata tertib yang sudah diatur. Perkawinan lari maksudnya ialah lamaran, hasil dari perkawinan lari ini terciptalah semanda atau perkawinan mentas/mandiri, perkawinan jujur, dan semua kembali kepada keadaan dan musyawarah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam sistem perkawinan lari pun ada macam dan perbedaannya bisa saja ia perkawinan lari karena terpaksa dan perkawinan lari karena bersama. Di daerah Lampung disebut "*Sembambangan metudau*". Perkawinan lari ini sebenarnya didasari dengan persetujuan si gadis. Adapun cara perkawinan lari

⁵⁶Diakses dari <http://aktivistangguh.blog.ugm.ac.id/2010/11/04/upacara-adat-pernikahan-masyarakat-pepaduan-Lampung/>, Pada Pukul 11: 45 WIB.

terjadi yaitu bujang dan gadis tersebut bersepakat melakukan kawin lari pada waktu yang sudah ditentukan mereka. Tata cara larian yaitu keluarga bujang datang ke kediaman gadis secara diam-diam mengajak ke kediaman bujang, ada pula gadis itu sendiri yang ke kediaman bujang.⁵⁷

Dalam adat lampung pepadun seorang gadis yang akan larian harus meninggalkan jejak atau berupa tanda akan kepergiannya dengan surat dan sejumlah uang (*tangepik*). Setelah itu ketempat kediaman punyimbang adat bujang, setelah itu mengadakan pertemuan kerabat serta menyampaikan permohonan maaf pada pihak gadis, lalu kedua pihak berunding.

Pada tahapan selanjutnya berbeda dengan Lampung beradat pesisir, ketika gadis larian, di mana pihak gadis menulis surat bagi keluarga yang berintikan terhadap suratnya kawin lari. kemudian pihak gadis lah yang mencari keberadaan gadis mengusut jejak (*nyusul tapak, nyusul luyut*) setelah itu pihak gadis bertanya kepada anak gadisnya pelarian ini dilakukan karena keinginan sendiri atau ada unsur paksaan.

Perkawinan lari paksaan adalah melarikan gadis dengan cara kekerasan, pelarian ini tidak dengan persetujuan si gadis dan juga tidak mengikuti tata tertib melakukan pelarian maka hal ini

⁵⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 190

dapat di laporkan kepada pihak yang berwajib, terdapat pada pasal 332 KUHP sebagai dasar pengaduan.⁵⁸

5. Larangan Perkawinan Adat Lampung

Dengan luasnya wilayah negara Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan tentang larangan perkawinan perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan kerabat. Ada beberapa daerah yang melarang adanya perkawinan antar kerabat dan ada pula yang menggemari adanya perkawinan antar kerabat.

Kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, seorang laki laki tidak bisa menikahi anak dari saudara lelaki ibu. Dan seorang anak dari saudara perempuan ayah (*ngakuk menulung*). Setelah ajaran Islam masuk larangan kawin dengan wanita anak kela (tulang, Batak) ini tercela. Jiak dilakukan perkawinan sebelum terjadinya upacara perkawinan wanita di naikkan ke langit-langit atap “tulah”, hal ini dikarenakan takutnya yang ghaib tidak merestui.⁵⁹

C. Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian Hukum Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

⁵⁸Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*,h. 57-58

⁵⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,h. 100-101

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan kekal. Suci berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Jadi ada beberapa prinsip pergaulan antara suami istri itu sebagai berikut:

- a. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing;
- b. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram);
- c. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai dan menyayangi terutama di masa muda (remaja);
- d. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua);⁶¹

⁶⁰Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 1

⁶¹*Ibid.*,h. 4

2. Dasar Hukum Perkawinan Islam

Hukum Perkawinan ialah yang mengatur tentang manusia dengan sesamanya, untuk menyalurkan hasrat biologisnya antarjenis, yang menimbulkan hak serta kewajiban dari adanya perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan *sunatullah*, Perkawinan tidak hanya meliputi manusia, tapi juga tumbuhan serta hewan. Sarjana Ilmu Alam pun mengatakan bahwasannya semua sesuatu di ciptakan dengan berpasang-pasangan seperti, air mineral (Oksigen dan Hidrogen), listrik, dan baterai ada positif dan negatifnya.⁶² Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الزاريات: 49)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. Al-Dzariyat (51):49)

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahatnya menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat

⁶²H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), h. 8

yang paling utama adalah maslahat yang terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *masfsadah* paling buruk dan dapat mendangkan kemaslahatan yang paling besar.

2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hambanya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah.

3. *Maslahat* mubah, Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung, sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala”.⁶³

Jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir* dan *taklif larangan* (*thalabal kaff*). Dalam *taklif larangan*, kemaslahatan adalah menolak atau mencegah kemadaratan. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merupakan dan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah,⁶⁴ *taklifi* berlaku dalam pernikahan;

a. *Wajib Menikah*, untuk orang yang telah mampu menikah dan hawa nafsunya tidak bisa di kendalikan untuk melakukan persetubuhan, dan hal ini yang di takutkan ia berzinah.

⁶³*Ibid*, h. 9

⁶⁴*Ibid*, h. 10

- b. *Nikah Haram* ketika nafsunya belum mendesak, dan ia juga tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya kelak.
- c. *Nikah Sunnah* yaitu nikah yang dimana nafsunya sudah sangat mendesak namun ia masih bisa menahan dari perbuatan haram.
- d. *Nikah Mubah* merupakan seseorang yang tidak begitu terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.⁶⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perkawinan menurut islam, pada dasarnya hukum tersebut bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahatnya atau mafsadatnya.

3. Tujuan Perkawinan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan perkawinan kebanyakan manusia pada hari ini, namun hendaknya karena tujuan-tujuan berikut ini:

- a. Melaksanakan anjuran Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* dalam sabdanya: *“Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah”*
- b. Keturunan umat yang memperbanyak keturunannya terdapat pada sabda Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam*: *“Menikahlah kalian*

⁶⁵Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” *jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol.14 No. 2, (Maret, 2016), h. 189

dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain”

- c. Suami dan istri dapat Menjaga kemaluannya masing-masing, dan saling menundukkan pandangan dari yang haram. ⁶⁶

4. Hikmah Perkawinan

Hikmah dari perkawinan dalam Islam, yang nantinya akan berpengaruh baik bagi pelaksanya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Dengan menikah dapat menyalurkan hasrat yang memuaskan melalui seks selain itu juga dengan kawin jiwa terasa tenang, dan yang tadinya haram menjadi haram, dan badan juga menjadi segar.
- b. Membuat anak-anak menjadi mulia ialah dengan Nikah. Dengan menikah memperoleh keturunan yang nantinya akan melestarikan hidup manusia dan juga dapat memelihara Islam.
- c. Naluri hati kebabakan serta keibuan akan mulai tumbuh seiring berjalannya waktu dengan anak-anak dan tumbuhlah pula rasa syang dan cinta yang akan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang

⁶⁶*Ibid*,h. 191

- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.⁶⁷

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin mempelai laki-laki dan calon pengantin mempelai wanita dalam perkawinan.

Syarat ialah sesuatu yang ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin mempelai laki-laki dan calon pengantin mempelai wanita itu harus beragama Islam.⁶⁸

a. Rukun Nikah

⁶⁷H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ...,19-20

⁶⁸*Ibid*,h. 12

- 1) Adanya calon suami
- 2) Adanya calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Saksi nikah
- 5) Ijab qabul

b. Syarat Nikah

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Di nyatakannya penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Menggunakan kalimat nikah
 - d) Bersambungannya antara ijab dan qabul

- e) Maksud dan tujuan ijab dan qabul jelas
- f) Orang yang melakukan ijab sedang tidak melakukan ikhram haji atau umrah
- g) Minimal ada 4 orang yang menghadiri Majelis ijab, yaitu, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dua orang saksi, dan calon mempelai pria atau yang mewakilinya.⁶⁹

D. Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Adat atau Urf

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, urf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal ini berulang kali dilakukan manusia.

Namun, sebenarnya adat itu lebih luas daripada urf sebab, adat kadang-kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *urf*. Dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Maka inilah disebut *urf*, baik urf itu bersifat khusus atau umum.⁷⁰

Bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *urf*, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan

⁶⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10

⁷⁰Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159

urf, tidaklah berarti kata adat dan *urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.

Kata adat dari bahasa Arab : عادة : akar katanya: ada ya udu - عاد

(يعود) : mengandung arti : تكرار (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair*.

Kata *urf* tidak melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal). Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang

kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁷¹

2. Urf: Dasar Pergumulan dalam Sejarah Islam

Abu sunah menegaskan bahwa yang di anggap *urf* tidak semua kebiasaan. Karena sering dilakukan bisa sampai berulang kali dan pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, disinilah *urf* dapat di terima oleh rasional dan akal sehat.

Sesungguhnya, syarat minimal keberlakuan *urf* hanya dua yaitu: ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa *urf* merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Sedangkan, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.⁷²

Islam datang sebenarnya bukan untuk memusnahkan *urf* yang telah ada di keliling masyarakat. Bahkan Islam datang untuk mengoreksi *urf-urf* yang berkembang di masyarakat, apabila bertentangan dengan ajaran Islam maka dimusnahkan, namun jika *Urf-Urf* itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka terus berjalan.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 363-364

⁷²M. Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, h. 68

Dilihat Secara sejarah atau historisnya, dalam Islam *urf* adalah keniscayaan. *Urf* berkembang secara turun temurun dari nenek moyang sebelumnya.

Urf menurut Imam Malik dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Karna dengan *urf* ini Imam Malik dapat menciptakan banyak karya seperti *Fath al-Ali al-Malik*, *al-Muwatta*, dan *al-Mudawanah*. Ahli madinah salah satunya *urf*. Istilah yang sering digunakan oleh Imam Malik “praktek yang kita setuju” Imam Malik memandang *urf* sebagai Ahli Madinah, dan ini sebagai salah satu sumber hukum yang paling kuat dalam pandangan Imam Malik, Hadith Ahad pun terkalahkan.

Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) berbeda dengan Imam Malik yang dimana, *urf* bukanlah sumber Hukum Islam. Pengikut dari Ibnu Qudamah (w.620 H), *urf* digunakan sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah berdasarkan pada diktum-diktum fiqhnya pada adat. Pengikut Ibnu hanbal seperti Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, *urf* di jadikan sebagai sumber hukum.⁷³

3. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam

Saat Islam memasuki wilayah Arab dan berkembang, berlakulah norma-norma bermuaamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan ini berlangsung lama dapat di sebut dengan adat. Adat ini diterima dari generasi sebelumnya dan juga diyakini dan mereka percaya bahwa ini baik untuk mereka.

⁷³*Ibid*, h. 69-70

Islam datang membawa seperangkat norma syara untuk mengatur kehidupan antar mausiabermuamalah dan dipatuhi ini sebagai ketaatan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Beberapa adat yang selaras dan ada pula yang bertentangan dengan hukum yang telah ditentukan. Sangat diutamakan prosesi penyeleksian adat yang masih diperlukan agar tetap terlaksana. Ada pula kemaslahatan menurut wahyuada 4 kelompok Adat:

- a) *Adat* yang di terima sepenuhnya dalam hukum Islam yaitu adat yang mengundang kemaslahatan dan tidak mengandung unsur mudharatnya atau dapat dikatakan terdapat manfaatnya lebih banyak di banding mudharatnya.
- b) *Adat* lama di terima dalam Islam, namun ada unsur maslahat yang dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, didalam pelaksanaannya mengalami penyesuaian dan perubahan.⁷⁴
- c) *Adat* lama yang mengandung unsur merusak, unsur manfaatnya lebih sedikit.
- d) *Adat* lama, orang banyak menerimanya karena tidak ada unsur mafsadat atau merusak dan tidak bertentangan dengan syara'.

Beberapa pengakuan dari kalangan ulama yang ber-kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,, h. 368

Al-Qur'an diterima dan dibentuk dengan cara tersendiri penetapan hukumnya dengan cara yang sebagaimana berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Ulama sepakat dalam menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama.⁷⁵

4. Kedudukan Urf dalam Sumber Hukum

urf merupakan *hujjah* yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat yang ditunjukkan oleh *Jumhur Fuqaha'* mengatakan bahwa. Berdasarkan pada dalil:

1) Firman Allah SWT

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Kata *urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

2) Hadist Rasulullah SAW

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula”⁷⁶

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,, h. 369-370.

⁷⁶ Musa Aripin, *Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, *Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1*, 2016, h. 211

Maksudnyayaitu perbuatan-perbuatan yang terjadi dimasyarakat jika yang menilai yaitu seorang mukmin sejati dan dalam pandangannya dinilai baik,maka Allah SWT pula yang menganggap hal itu baik.

- 3) Syariat Islam mengubah kebiasaan arab secara detail dan menetapkan hukumnya demi kemaslahatan orang ramai, memberikan denda kepada orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, melaksanakan akad salam. Islam juga membrantas adat arab di zaman dahulu seperti mengubur anak perempuan,kaum wanita yang tidak mendapatkan harta warisan.
- 4) Islam mengajarkan memudahkan segala urusan dan menghilangkan segala kesusahan urusan setiap manusia dan meninggalkan keniasaan yang buruk karena ini akan menjerumuskan mereka kedalam jurang.
- 5) Islam datang tidak untuk menghapus tradisi arab namun lebih memilih secara selektif ada beberapa yang di lestarikan dan ada beberapa pula yang di hapuskan.⁷⁷

5. Urf dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karenaitu, dalam hal ini perbedaan

⁷⁷*Ibid*, h. 212

pendapat para ulama fikih berkata : “perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, telah melakukan upaya kodifikasi, kompilasi, dan positivisasi produk-produk fiqh agar dapat dijadikan referensi oleh para hakim di Pengadilan Agama. Sebelumnya para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama seperti halnya KUHP. Akibatnya, jika para hakim di Pengadilan Agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fiqh tanpa suatu penyeragaman. Kemudian, secara praktis, terhadap kasus yang sama bisa memunculkan putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Sasaran proyek KHYI ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang Hukum Perkawinan yang kemudian tercantum dalam Buku I, Hukum Kewarisan yang tercantum dalam buku II, dan Hukum Perwakafan dalam buku III KHI.

Para ulama dan pakar Hukum Islam yang terlibat dalam perumusan KHI sangat mempertimbangkan nilai-nilai syari'ah dalam menggali *masalah* yang ada pada masyarakat Islam. Hal ini bisa dilihat dari unsur-unsur adat kebiasaan (*urf*) yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang terdapat dalam KHI.⁷⁸

⁷⁸Musa Aripin, *Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 213

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian saat ini. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya:

1. Penelitian dari Lazuardi Nurdiman dengan judul “Penetapan Uang Sesorahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sekawan Kota Depok Perspektif Hukum Islam” dengan fokus penelitian guna mengetahui penetapan uang seserahan nikah pada masyarakat Kelurahan Sekawan Kota Depok dalam hukum Islam, dengan analisa data deskriptif kualitatif di mana hasil dari penelitian bahwa ketentuan uang seserahan nikah dilakukan pada acara mufakat secara terpisah maupun bersamaan yang dilakukan antara kedua belah pihak, akan tetapi pada keputusan dari pihak perempuan dirasakan terlalu tinggi akan tetapi diperbolehkan untuk ditawarkan, akan tetapi keputusan tetap pada pihak wanita. Sedangkan pada penelitian ini kesamaan dengan penelitian dari penulis tentang penetapan seserahan.
2. Penelitian dari Meli Fitria dengan judul “Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya) dengan fokus penelitian guna mengetahui *Sesan* di dalam masyarakat Lampung Pepadun di Desa Gunung Sugih Raya dengan metode analisa data deskriptif kualitatif dan pada hasil penelitian

menyebutkan bahwa *Sesan* di dalam masyarakat adat Pepadun diwajibkan jika pihak perempuan telah terikat dengan *jujur* maka pihak perempuan sendiri otomatis membawa *Sesan* ketika mereka akan menghantarkan mempelai, sedangkan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian dari peneliti ialah sama sama membahas mengenai *sesan* serta ditinjau dari hukum Islam.

3. Penelitian dari Fatin Najwa Binti Kamaruddin menerangkan bahwa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping Perak Malaysia” dengan fokus penelitian guna mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif maka hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penerapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping berdasarkan ‘*Urf* sedangkan kesamaan dengan penelitian dari peneliti sendiri ialah sama sama ditinjau dari perspektif hukum Islam, metode analisa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah Tijariah al-kubro, 1423H
- Abdullah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, Bandar Lampung: Gramedia, 2008
- Al- Hadi, *Al- Qur'an Terjemah Edisi Doa*, Depok: Al-Hudd Kelompok Gema Insani, 2012
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Cristian Heru Cahyo Saputro, *Piil Pesenggiri Etos dan Semangat KeLampungan*, Bandar Lampung: Jung Foundation Lampung Heritage, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010
- Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2006
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016 Kartini
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, Jakarta: Kencana, 2014

Nazaruddin, *Dinul Islam*, Bandung: PT. Alma'arif, 1997

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005

Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibati* Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau, 2013

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004

Trianto Dan Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007

Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat, Bandar Lampung*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016

Artikel & Jurnal:

Afrizal Jumli, *Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016

Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, Tahun 2017

Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 07 Desember 2018 pukul 19.00 WIB.

<http://aktivistangguh.blog.ugm.ac.id/2010/11/04/upacara-adat-pernikahan-masyarakat-pepaduan-Lampung/>

Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, *Jurnal al-Adalah*, Vol XIII, Nomor 2, 2016

- Meli Pitria, *Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam , studi kasus di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016
- Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Musa Aripin, *Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1, 2016
- M. Noor Harisudin, *Urf Seabagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016
- Prima Angkupi, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevasinya Terhadap Hak Asasi Manusia*, ASY, SYIR'AH, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No.2, Desember 2015
- Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1 Maret 2018
- Syaeful Bakhri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Sesorahan di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol.14 No. 2, Maret, 2016
- Yula Fadilah, *PEMBERIAN GELAR ADAT, Studi tentang Prosedur, Makna, Fungsi Pemberian Gelar Adat, pada Masyarakat Lampung Pepadun Sungkai Di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara*, Universitas Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung, 2018